

An Analysis of First-Time Voters' Digital Political Participation and Ideological Polarization in Elections

*Arditya Prayogi*¹, *Ali Ismail Shaleh*², *Ahmad Said*³

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

Email: ¹, ², ³

ABSTRACT

The digitalization of political communication expanded first-time voters' participation while simultaneously intensifying ideological polarization through social media during elections. This study aimed to analyze first-time voters' digital political participation, identify the mechanisms shaping ideological polarization, and develop a conceptual model explaining their relationship. A qualitative multiple case study design was employed. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, nonparticipant digital observation, and digital artifact documentation, then analyzed using reflexive thematic analysis through within-case and cross-case procedures. The findings identified four interconnected processes: personalized political exposure, digital expression as identity affirmation, networked validation reinforcing political positions, and ideological boundary crystallization. Networked ideological reinforcement emerged as the principal mechanism linking digital political participation with ideological polarization. Nevertheless, diverse information exposure, systematic information verification, cross-group interaction, and critical reflection generated a reflective moderation pathway that reduced polarization tendencies. The study developed the Digital Participation-Ideological Polarization Mechanism among First-Time Voters, demonstrating that ideological polarization constituted a conditional outcome of recurring political expression, social validation, and identity reinforcement while highlighting first-time voters as active agents capable of strengthening or moderating ideological boundaries within increasingly personalized digital electoral environments.

Keywords: digital political participation, first-time voters, ideological polarization, networked reinforcement, elections

ABSTRAK

Digitalisasi komunikasi politik telah memperluas partisipasi pemilih pemula, tetapi interaksi politik melalui media sosial juga menghadirkan risiko penguatan batas ideologis selama pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses partisipasi politik digital pemilih pemula, mengidentifikasi mekanisme pembentukan polarisasi ideologis, dan mengonstruksi model konseptual yang menjelaskan hubungan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi digital nonpartisipatif, dan dokumentasi artefak digital, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif melalui analisis dalam kasus dan lintas kasus. Hasil penelitian mengidentifikasi empat proses utama, yaitu personalisasi paparan politik, ekspresi digital sebagai penegasan identitas, validasi berjejaring sebagai penguatan posisi politik, dan kristalisasi batas ideologis. Penguatan ideologis berjejaring ditemukan sebagai mekanisme proksimal yang menghubungkan ekspresi politik digital dengan polarisasi. Namun, paparan beragam, pemeriksaan informasi, interaksi lintas kelompok, dan refleksi kritis membentuk lintasan moderasi.

Corresponding Author:

arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

Received: April 05, 2026;

Revised: May 19, 2026;

Accepted: May 27, 2026;

Published: June 30, 2026.

Volume: 1 Number: 1 | Juni 2026

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/ardi>

Penelitian menghasilkan model Mekanisme Partisipasi Digital dan Polarisasi Ideologis Pemilih Pemula yang menjelaskan polarisasi sebagai konsekuensi kondisional dari siklus ekspresi, validasi sosial, dan penguatan identitas dalam lingkungan politik digital, memperluas kajian partisipasi politik dengan menempatkan pemilih pemula sebagai aktor aktif dalam pembentukan atau moderasi batas ideologis.

Kata Kunci: partisipasi politik digital, pemilih pemula, polarisasi ideologis, penguatan berjejaring, pemilihan umum

PENDAHULUAN

Digitalisasi komunikasi politik telah mengubah struktur partisipasi warga negara dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai medium penyampaian informasi politik, tetapi berkembang menjadi arena tempat warga menginterpretasikan isu, mengekspresikan preferensi, mendistribusikan pesan, membentuk jaringan, dan mempertahankan identitas politik. Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi pemilih pemula yang memasuki arena elektoral dalam lingkungan komunikasi yang telah terdigitalisasi. Berbeda dengan generasi pemilih sebelumnya yang mengalami sosialisasi politik terutama melalui keluarga, organisasi, dan media konvensional, pemilih pemula semakin berhadapan dengan politik melalui linimasa, video pendek, komentar, rekomendasi algoritmik, dan interaksi jejaring. Ekström dan Shehata (2018) menunjukkan bahwa media sosial telah menciptakan batas yang semakin poros antara aktivitas keseharian dan keterlibatan politik kaum muda. Dalam konteks ini, pengalaman politik berkembang sebagai bagian dari praktik komunikasi digital sehari-hari dan membentuk jalur baru menuju partisipasi.

Perubahan tersebut menjadi semakin signifikan ketika teknologi digital memungkinkan keterlibatan politik berlangsung melalui tindakan sederhana sekaligus berulang. Mengikuti akun kandidat, memberikan tanda suka, mengomentari isu, membagikan konten, membuat video politik, atau terlibat dalam perdebatan daring telah memperluas bentuk partisipasi melampaui aktivitas politik konvensional. Boulianne (2020) menunjukkan bahwa perkembangan media digital selama dua dekade memiliki keterkaitan yang konsisten dengan partisipasi sipil dan politik. Meta-analisis Boulianne dan Theocharis (2020) juga memperlihatkan hubungan positif antara penggunaan media digital dan keterlibatan kaum muda. Secara lebih spesifik, Ohme (2019) menemukan bahwa penggunaan media sosial politik oleh pemilih pertama memiliki implikasi terhadap partisipasi kampanye. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilih pemula bukan lagi sekadar sasaran komunikasi elektoral, tetapi telah berkembang menjadi aktor yang terlibat dalam sirkulasi politik digital.

Pada konteks Indonesia, transformasi ini beriringan dengan meningkatnya posisi kaum muda dalam demokrasi digital. Saud dan Margono (2021) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi digital di Indonesia telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik kaum muda. Penggunaan

media sosial juga berkaitan dengan keterlibatan kewargaan kelompok digital native Indonesia (Tarsidi et al., 2023). Sukidin et al. (2025) selanjutnya memperlihatkan bahwa aktivitas media sosial dan partisipasi dalam diskursus publik memiliki keterkaitan dengan sikap terhadap demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum kontemporer tidak dapat dipahami hanya melalui kampanye formal dan perilaku pemilih di tempat pemungutan suara. Sebagian penting proses pembentukan orientasi politik telah berlangsung sebelumnya melalui interaksi digital yang terus-menerus.

Namun, perluasan partisipasi politik digital menghadirkan paradoks demokratis. Pada satu sisi, media digital menurunkan hambatan partisipasi dan menyediakan ruang ekspresi yang lebih fleksibel. Pada sisi lain, ruang yang sama dapat memperkuat fragmentasi politik, penyebaran informasi partisan, dan pembentukan jarak antarkelompok. Setiawati et al. (2023) menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia dan Filipina memiliki persepsi kritis terhadap media sosial sebagai sumber berita politik dalam masyarakat yang terpolarisasi. Dalam konteks Pemilu Presiden Indonesia 2024, Subekti et al. (2025) mengidentifikasi penggunaan disinformasi digital yang diarahkan kepada kandidat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemilih pemula memasuki ruang politik digital yang tidak hanya kaya informasi, tetapi juga dipenuhi persaingan narasi, keberpihakan, dan konten yang dapat mengaburkan batas antara informasi politik dan manipulasi komunikasi.

Polarisasi menjadi salah satu konsekuensi yang penting dikaji dalam perubahan ekosistem komunikasi tersebut. Polarisasi tidak semata-mata menunjukkan adanya perbedaan pilihan politik, karena perbedaan merupakan karakter normal demokrasi. Persoalan muncul ketika perbedaan berkembang menjadi penajaman batas ideologis dan jarak sosial antara kelompok politik. Boxell et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan polarisasi afektif memiliki variasi lintas negara dan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Kubin dan von Sikorski (2021), melalui tinjauan sistematis, juga menemukan bahwa hubungan media sosial dengan polarisasi politik bersifat kompleks serta dipengaruhi oleh karakter media, bentuk paparan, dan dimensi polarisasi yang dianalisis. Oleh karena itu, hubungan antara aktivitas digital dan polarisasi tidak memadai apabila dijelaskan melalui asumsi deterministik bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi pula polarisasi politik.

Kompleksitas tersebut terlihat pada struktur interaksi dalam media sosial. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa efek *echo chamber* muncul melalui pola homofili dan difusi informasi yang berbeda pada berbagai platform. Dalam struktur semacam ini, pengguna memiliki kemungkinan untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan informasi dan kelompok yang sejalan dengan orientasi mereka. Huszár et al. (2022) juga menunjukkan bahwa sistem algoritmik dapat

menghasilkan amplifikasi terhadap konten politik. Akan tetapi, paparan digital tidak selalu menghasilkan perubahan sikap secara langsung. Guess et al. (2023) menemukan bahwa pembagian ulang konten memperkuat penyebaran berita politik, tetapi tidak menunjukkan pengaruh yang dapat dideteksi terhadap keyakinan atau opini. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa polarisasi perlu dianalisis melalui mekanisme yang berada di antara paparan informasi dan pembentukan orientasi politik.

Salah satu mekanisme tersebut adalah ekspresi politik digital. Cho et al. (2018) menunjukkan bahwa ekspresi politik daring dapat menghasilkan proses *self-reinforcement*, yaitu ketika tindakan mengekspresikan pandangan politik memperkuat orientasi individu sendiri. Dalam konteks pemilih pemula, tindakan memberikan komentar, membagikan konten, membuat video, atau mempertahankan pilihan politik dapat memiliki konsekuensi reflektif terhadap identifikasi politik. Pengguna tidak hanya mengomunikasikan preferensi kepada orang lain, tetapi juga menegaskan posisi politik kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, partisipasi politik digital dapat menjadi proses pembentukan identitas melalui tindakan komunikatif yang dilakukan secara berulang.

Dimensi ekspresif semakin relevan dalam budaya digital kaum muda. Zhu et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara kreatif berkaitan dengan partisipasi politik kaum muda melalui peran ekspresi politik daring. Moffett dan Rice (2024) juga menemukan hubungan antara penggunaan TikTok dan aktivitas kewargaan kaum muda. Kligler-Vilenchik dan Literat (2025) mengembangkan konsep *expressive citizenship* untuk menjelaskan bentuk kewargaan kaum muda yang semakin personal, kreatif, dan berjejaring. Dalam konteks tersebut, partisipasi politik tidak selalu tampil sebagai argumentasi formal mengenai kebijakan. Meme, video pendek, humor, simbol, dan praktik budaya populer dapat menjadi sarana ekspresi politik. Pergeseran ini memperluas ruang partisipasi, tetapi sekaligus membuat proses pembentukan posisi politik semakin terhubung dengan performa identitas dan respons sosial dari jaringan digital.

Karakter konten yang memperoleh keterlibatan tinggi juga berpotensi memperkuat proses tersebut. Brady et al. (2017) menunjukkan bahwa bahasa moral dan emosional memiliki kapasitas difusi yang kuat dalam jaringan sosial. Rathje et al. (2021) menemukan bahwa animositas terhadap kelompok luar menjadi pendorong penting keterlibatan pada media sosial. Sementara itu, Osmundsen et al. (2021) menunjukkan bahwa polarisasi partisan merupakan motivasi psikologis penting di balik perilaku berbagi berita politik palsu. Weismueller et al. (2024) selanjutnya menemukan bahwa kepalsuan informasi dan keberpihakan memiliki peran dalam hubungan antara berbagi informasi dan polarisasi politik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan partisipatif berupa berbagi dan merespons konten dapat terhubung dengan dinamika ideologis yang lebih luas.

Hubungan tersebut tidak berarti bahwa perjumpaan dengan pandangan berbeda secara otomatis menghasilkan moderasi. Bail et al. (2018) menunjukkan bahwa paparan terhadap pandangan politik yang berlawanan di media sosial justru dapat meningkatkan polarisasi dalam kondisi tertentu. Temuan ini penting karena menantang asumsi bahwa keberagaman informasi selalu memperkecil jarak ideologis. Individu dapat menafsirkan pandangan lawan melalui identitas politik yang telah terbentuk sehingga paparan terhadap kelompok berbeda menjadi sumber penguatan posisi sendiri. Pada level diskursus, Demszky et al. (2019) menunjukkan bahwa polarisasi media sosial dapat teridentifikasi melalui perbedaan cara kelompok membingkai persoalan. Dengan demikian, batas ideologis tidak hanya terbentuk melalui topik yang dikonsumsi, tetapi juga melalui cara realitas politik diberi makna dan dikomunikasikan.

Bagi pemilih pemula, proses tersebut menjadi penting karena pengalaman elektoral pertama berlangsung bersamaan dengan pembentukan identitas politik. Partisipasi digital memungkinkan orientasi awal diekspresikan kepada jaringan sosial, memperoleh respons, dan dipertahankan dalam interaksi berikutnya. Dukungan dari kelompok yang memiliki pandangan serupa dapat menghasilkan validasi sosial, sedangkan konflik dengan kelompok berbeda dapat memperjelas batas identitas. Dalam proses berulang, aktivitas politik digital berpotensi bergerak dari paparan informasi menuju ekspresi, distribusi, penguatan sosial, dan kristalisasi batas ideologis. Perspektif ini menempatkan pemilih pemula sebagai aktor aktif dalam proses polarisasi, bukan semata-mata korban algoritma atau penerima propaganda.

Kajian mengenai *platform affordances* semakin memperkuat pentingnya melihat tindakan pengguna. Theocharis et al. (2023) menunjukkan bahwa karakteristik platform membentuk kemungkinan dan bentuk partisipasi politik. Setiap platform menyediakan struktur tindakan yang berbeda bagi pengguna untuk memproduksi, merespons, dan mendistribusikan pesan. Oleh sebab itu, aktivitas mengikuti informasi politik tidak dapat disamakan secara analitis dengan berdebat, membagikan konten partisan, atau memproduksi pesan politik. Perbedaan bentuk keterlibatan tersebut berpotensi menghasilkan pengalaman sosial dan konsekuensi ideologis yang berbeda. Analisis partisipasi pemilih pemula dengan demikian perlu bergerak melampaui ukuran intensitas penggunaan media sosial menuju pemahaman mengenai praktik digital yang benar-benar dilakukan.

Penelitian terdahulu telah menghasilkan landasan penting, tetapi masih memperlihatkan fragmentasi fokus. Kelompok pertama penelitian lebih banyak menjelaskan hubungan media digital dengan keterlibatan politik kaum muda dan partisipasi elektoral (Boulianne, 2020; Boulianne & Theocharis, 2020; Ekström & Shehata, 2018; Ohme, 2019). Kelompok kedua menelaah struktur dan dinamika polarisasi digital melalui *echo chamber*, amplifikasi algoritmik, paparan berlawanan, dan pola diskursus (Bail et al., 2018; Cinelli et al., 2021; Demszky et al., 2019; Huszár et al., 2022; Kubin

& von Sikorski, 2021). Kelompok ketiga berfokus pada karakter konten dan perilaku berbagi yang berkaitan dengan emosi moral, animositas kelompok luar, kepalsuan informasi, dan keberpihakan (Brady et al., 2017; Osmundsen et al., 2021; Rathje et al., 2021; Weismueller et al., 2024). Ketiga kelompok tersebut kaya secara konseptual, tetapi hubungan prosedural antara praktik partisipasi pemilih pemula dan pembentukan polarisasi ideologis belum dijelaskan secara terintegrasi.

Keterbatasan serupa terlihat dalam kajian konteks Indonesia. Saud dan Margono (2021) telah menjelaskan perkembangan partisipasi politik kaum muda dalam demokrasi digital Indonesia, sedangkan Tarsidi et al. (2023) membahas penggunaan media sosial dan keterlibatan kewargan digital native. Setiawati et al. (2023) mengungkap persepsi mahasiswa terhadap media sosial sebagai sumber berita politik dalam masyarakat terpolarisasi. Sukidin et al. (2025) menelaah aktivitas media sosial, diskursus publik, dan sikap demokrasi, sementara Subekti et al. (2025) mengidentifikasi disinformasi kandidat dalam Pemilu Presiden 2024. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana tindakan partisipatif pemilih pemula dalam ruang digital menghasilkan proses penguatan posisi politik dan pembentukan jarak ideologis selama pemilihan umum.

Berdasarkan sintesis tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya kajian partisipasi politik digital pemilih pemula dengan mekanisme prosedural pembentukan polarisasi ideologis. Studi partisipasi cenderung menempatkan keterlibatan digital sebagai hasil mobilisasi atau bentuk perluasan demokrasi, sedangkan studi polarisasi lebih dominan menelaah struktur jaringan, algoritma, paparan, dan karakter konten. Pemilih pemula juga sering ditempatkan sebagai kategori demografis yang homogen, padahal praktik partisipasi mereka bergerak dari konsumsi informasi, ekspresi simbolik, distribusi konten, interaksi argumentatif, hingga mobilisasi jaringan. Kesenjangan ini menuntut analisis yang mampu merekonstruksi pengalaman dan proses sosial yang menghubungkan tindakan digital dengan penajaman batas ideologis.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi mekanisme partisipasi–polarisasi digital pemilih pemula melalui empat proses yang saling berhubungan, yaitu paparan politik digital, ekspresi dan distribusi politik, penguatan sosial berjejaring, serta kristalisasi batas ideologis. Paparan politik menyediakan material informasi dan simbol yang ditafsirkan pemilih; ekspresi dan distribusi mengubah orientasi personal menjadi tindakan komunikatif; respons jaringan menghasilkan validasi, penguatan, atau konflik; sedangkan interaksi berulang membentuk penegasan identitas dan jarak terhadap kelompok politik yang berbeda. Kerangka tersebut tidak menempatkan media sosial sebagai penyebab tunggal polarisasi, tetapi menjelaskan bagaimana praktik partisipatif dapat menjadi mekanisme yang mengaktifkan dan memperkuat proses ideologis dalam lingkungan digital.

Atas dasar argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan pengalaman partisipasi politik digital pemilih pemula dalam pemilihan umum, mengidentifikasi mekanisme sosial dan komunikatif yang menghubungkan aktivitas digital dengan pembentukan polarisasi ideologis, serta mengonstruksi model konseptual mekanisme partisipasi–polarisasi digital pemilih pemula. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian komunikasi politik dan partisipasi digital melalui integrasi perspektif ekspresi politik, penguatan sosial berjejaring, dan polarisasi ideologis. Secara empiris, penelitian menempatkan pemilih pemula sebagai aktor aktif yang tidak hanya menerima informasi politik, tetapi turut memproduksi, mendistribusikan, menegosiasikan, dan mereproduksi batas ideologis melalui praktik partisipasi digital dalam pemilihan umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *multiple case study* untuk menganalisis proses partisipasi politik digital pemilih pemula dan keterkaitannya dengan pembentukan polarisasi ideologis dalam pemilihan umum. Desain ini dipilih karena fenomena tersebut berlangsung dalam konteks kehidupan nyata dan terbentuk melalui interaksi pengalaman elektoral, penggunaan media sosial, jaringan sosial, dan interpretasi konten politik. Analisis beberapa kasus memungkinkan identifikasi persamaan, variasi, serta pola prosedural antarkasus untuk merekonstruksi hubungan tindakan partisipatif digital dan pembentukan batas ideologis secara kontekstual. Unit analisis penelitian adalah pengalaman dan praktik partisipasi politik digital pemilih pemula selama periode pemilihan umum.

Kasus dipilih melalui *purposive case selection* berdasarkan variasi pengalaman partisipasi digital, meliputi intensitas penggunaan media sosial untuk memperoleh informasi politik, keterlibatan dalam ekspresi dan distribusi konten, interaksi dengan kelompok politik berbeda, serta partisipasi dalam jaringan digital. Pemilihan kasus tidak didasarkan pada afiliasi kandidat atau ideologi tertentu, tetapi pada karakter pengalaman partisipatif dan keragaman lingkungan sosial. Partisipan dipilih menggunakan *purposive sampling* yang dapat dikembangkan melalui *snowball sampling*. Kriteria partisipan mencakup pemilih yang menggunakan hak pilih untuk pertama kali, aktif pada sekurang-kurangnya satu platform media sosial selama periode elektoral, mengakses konten politik, serta memiliki pengalaman berinteraksi dengan informasi atau diskusi mengenai kandidat, partai, dan isu pemilihan umum. Jumlah partisipan mengikuti kecukupan informasi dan kejenuhan data ketika pengumpulan data tambahan tidak lagi menghasilkan pola konseptual substantif yang baru.

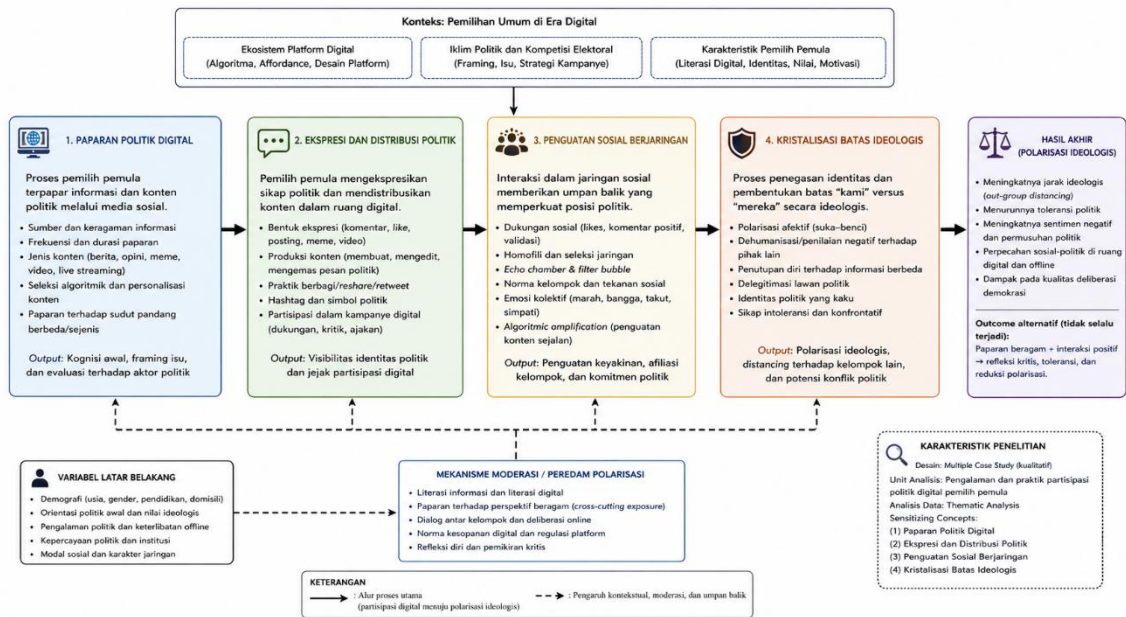
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur selama 45-90 menit, observasi digital nonpartisipatif, dan dokumentasi artefak digital. Wawancara merekonstruksi

pengalaman partisipan sejak memperoleh informasi hingga mengekspresikan atau mempertahankan posisi politik dengan mengeksplorasi pola paparan, ekspresi dan distribusi konten, respons jaringan, pengalaman dukungan atau penolakan, serta perubahan pandangan terhadap kelompok politik berbeda. Observasi dilakukan secara etis terhadap interaksi publik yang relevan dengan memperhatikan ekspresi politik, pola distribusi, simbol identitas, dan interaksi antarpengguna tanpa intervensi peneliti. Artefak digital berupa unggahan publik, materi yang dibagikan, tangkapan layar sukarela, dan jejak digital relevan digunakan untuk memperkaya konteks narasi wawancara.

Data dianalisis menggunakan *reflexive thematic analysis* secara iteratif melalui familiarisasi data, *initial coding*, pengembangan tema, peninjauan, dan interpretasi tematik. Pengodean terutama bersifat induktif terhadap pengalaman, tindakan, interpretasi, emosi, dan interaksi politik digital. Empat *sensitizing concepts* digunakan sebagai orientasi analitis, yaitu paparan politik digital, ekspresi dan distribusi politik, penguatan sosial berjejaring, serta kristalisasi batas ideologis. Konsep tersebut meningkatkan kepekaan analitis terhadap proses partisipasi-polarisasi tanpa menjadi kategori tetap yang membatasi munculnya tema alternatif.

Analisis dilakukan melalui *within-case thematic analysis* untuk merekonstruksi lintasan pengalaman setiap kasus dalam narasi prosesual dan matriks tematik, kemudian dilanjutkan dengan *cross-case thematic analysis* untuk membandingkan pola, mekanisme berulang, variasi lintasan, dan kasus yang menyimpang dari pola dominan. Penelitian tidak mengasumsikan seluruh partisipasi digital menghasilkan polarisasi. *Negative cases*, termasuk pengalaman yang menghasilkan refleksi, toleransi, atau moderasi politik, dianalisis untuk membandingkan lintasan penguatan dan moderasi. Sintesis lintas kasus selanjutnya digunakan untuk mengonstruksi model konseptual mekanisme partisipasi–polarisasi digital pemilih pemula.

Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, *member reflection*, *peer debriefing*, dan *audit trail*. Data wawancara dibandingkan dengan observasi serta artefak digital, sedangkan interpretasi utama direfleksikan secara selektif bersama partisipan. Perkembangan kode, revisi tema, keputusan analitis, dan posisi reflektif peneliti didokumentasikan secara sistematis. Prinsip etika diterapkan melalui *informed consent*, anonimisasi identitas, pembatasan penggunaan artefak digital, dan penyimpanan data secara aman. Identitas politik serta jejak digital diperlakukan sebagai data sensitif dengan menghilangkan informasi yang memungkinkan identifikasi individu. Prosedur tersebut menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai mekanisme partisipasi politik digital dalam membentuk atau memoderasi polarisasi ideologis pemilih pemula.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Mekanisme Partisipasi Politik Digital dan Polarisasi Ideologis Pemilih Pemula

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti berdasarkan sintesis konseptual dan kerangka penelitian (2026).

Gambar 1 model menggambarkan proses partisipasi politik digital pemilih pemula melalui paparan politik digital, ekspresi dan distribusi politik, penguatan sosial berjejaringan, serta kristalisasi batas ideologis. Proses tersebut dapat mengarah pada polarisasi ideologis, tetapi dipengaruhi oleh konteks digital dan mekanisme moderasi yang memungkinkan terbentuknya refleksi kritis, toleransi politik, dan reduksi polarisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis melalui *within-case thematic analysis* dan *cross-case thematic analysis* menunjukkan bahwa partisipasi politik digital pemilih pemula tidak membentuk lintasan seragam menuju polarisasi ideologis. Variasi ditemukan pada sumber informasi, intensitas keterlibatan, bentuk ekspresi, struktur jaringan sosial, dan pemaknaan terhadap kelompok politik berbeda. Meskipun demikian, analisis lintas kasus mengidentifikasi empat tema yang menjelaskan proses dari keterpaparan politik menuju pembentukan atau penegasan batas ideologis, yaitu personalisasi paparan dan pembingkaihan orientasi politik, ekspresi digital sebagai penegasan identitas politik, validasi

berjaringan dan penguatan posisi politik, serta kristalisasi batas ideologis dan lintasan moderasi. Keempat tema saling berhubungan, tetapi tidak selalu berkembang secara linear.

Personalisasi Paparan dan Pembingkaihan Orientasi Politik

Pengalaman politik digital pemilih pemula diawali oleh paparan informasi yang bersifat campuran dan semakin terpersonalisasi. Sebagian partisipan pada awalnya tidak aktif mencari informasi politik. Konten kandidat, partai, dan isu pemilihan umum muncul di antara hiburan, informasi pendidikan, budaya populer, dan komunikasi sehari-hari. Paparan insidental membuat politik memasuki pengalaman digital tanpa selalu didahului motivasi politik yang kuat.

Paparan awal berasal dari akun berita, konten kreator, teman sebaya, keluarga, dan materi yang dibagikan ulang dalam jaringan sosial. Ketika partisipan mulai menonton, memberikan tanda suka, membuka komentar, atau mengikuti akun tertentu, pola informasi yang diterima menjadi semakin serupa. Kandidat dan isu tertentu muncul secara berulang dalam linimasa sehingga menciptakan persepsi mengenai pentingnya suatu isu atau luasnya dukungan terhadap pandangan tertentu.

Analisis lintas kasus mengidentifikasi tiga pola paparan. Pertama, *incidental political exposure*, ketika informasi politik diterima tanpa pencarian aktif. Kedua, *selective political exploration*, ketika partisipan mulai mencari informasi mengenai kandidat atau isu yang menarik perhatian. Ketiga, *personalized repetitive exposure*, ketika konten yang relatif sejalan muncul secara berulang dalam lingkungan digital. Pergerakan di antara ketiga pola tersebut sering tidak disadari, tetapi secara bertahap membentuk kerangka awal pemilih dalam memahami kompetisi elektoral.

Paparan berulang turut membentuk cara partisipan membingkai aktor politik. Kandidat diasosiasikan dengan karakter, isu, atau simbol yang dominan dalam konten digital. Sebagian partisipan mengembangkan kesan positif atau negatif sebelum memahami program politik secara mendalam. Video pendek, potongan pernyataan, meme, dan komentar pengguna menjadi referensi awal penilaian. Dengan demikian, orientasi politik awal tidak hanya terbentuk melalui substansi informasi, tetapi juga frekuensi, format, dan konteks sosial paparan.

Namun, ditemukan lintasan berbeda pada partisipan yang aktif membandingkan beberapa sumber, mencari versi lengkap potongan video, dan membaca informasi dari orientasi berbeda. Keberagaman informasi pada kelompok ini justru menghasilkan keraguan dan pemeriksaan lebih lanjut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa paparan digital menyediakan material interpretatif, sedangkan konsekuensi ideologisnya bergantung pada cara pemilih berinteraksi dengan informasi.

Ekspresi Digital sebagai Penegasan Identitas Politik

Perubahan penting terjadi ketika pemilih bergerak dari konsumsi informasi menuju ekspresi posisi politik. Ekspresi tidak selalu berupa dukungan eksplisit. Memberikan tanda suka, menggunakan simbol, membagikan video, menulis komentar singkat, dan mengunggah humor politik sering dipandang sebagai tindakan sederhana. Namun, tindakan tersebut menjadikan orientasi politik terlihat oleh jaringan sosial.

Tiga tingkat ekspresi teridentifikasi. Pertama, *low-visibility engagement*, berupa menyukai konten, mengikuti akun, atau menyimpan materi politik. Kedua, *network-visible expression*, ketika partisipan membagikan, mengomentari, atau menggunakan simbol politik yang terlihat oleh jaringan. Ketiga, *active political content production*, berupa pembuatan atau modifikasi konten, penyusunan argumentasi, dan keterlibatan aktif dalam diskusi digital.

Semakin terlihat ekspresi politik, semakin kuat hubungan antara tindakan digital dan identitas politik. Respons teman, keluarga, dan pengguna lain membuat partisipan menyadari bahwa jejak digital mereka dibaca sebagai representasi posisi politik. Beberapa partisipan memperoleh pertanyaan mengenai kandidat yang didukung setelah membagikan konten tertentu meskipun belum menyatakan pilihan secara eksplisit. Pelabelan sosial tersebut mendorong mereka menjelaskan atau mempertahankan posisi.

Ekspresi berulang juga memperkuat konsistensi identitas. Setelah menunjukkan dukungan atau kritik secara terbuka, sebagian partisipan merasa perlu menjaga kesesuaian antara unggahan terdahulu dan pendapat berikutnya. Perubahan posisi dipersepsikan dapat menimbulkan pertanyaan dari jaringan. Akibatnya, mereka cenderung mencari argumentasi yang memperkuat ekspresi sebelumnya dan menjadi lebih selektif terhadap informasi yang bertentangan.

Humor, meme, dan video pendek memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Meskipun dianggap lebih ringan daripada argumentasi formal, format ini memuat penilaian terhadap kandidat dan kelompok pendukung. Penggunaan berulang terhadap istilah, julukan, dan simbol tertentu membentuk penanda identifikasi kelompok. Namun, tidak seluruh ekspresi mempertegas identitas. Beberapa partisipan membagikan konten kandidat berbeda sebagai bentuk eksplorasi dan memisahkan aktivitas berbagi dari identitas politik personal. Konsekuensi ekspresi dengan demikian dipengaruhi oleh makna tindakan dan respons jaringan.

Validasi Berjaringan dan Penguatan Posisi Politik

Respons jaringan menjadi titik penting ketika partisipasi digital berkembang menjadi penguatan posisi politik. Setelah mengekspresikan orientasi, partisipan menerima tanda suka, komentar, dukungan, sanggahan, ejekan, dan perdebatan. Respons tersebut dipahami bukan sekadar sebagai interaksi digital, tetapi sebagai informasi sosial mengenai penerimaan atau penolakan terhadap posisi politik. Dukungan dari pengguna berpandangan serupa menghasilkan

pengalaman validasi. Partisipan merasa lebih yakin ketika pendapat memperoleh respons positif atau argumentasi serupa ditemukan pada banyak akun. Pada beberapa kasus, besarnya dukungan terhadap konten bahkan dipersepsikan sebagai indikator kebenaran atau kekuatan suatu posisi. Validasi tersebut mendorong partisipan mengikuti akun sejalan, memasuki percakapan dengan orientasi serupa, dan meningkatkan distribusi konten.

Analisis lintas kasus menemukan pola *expression-validation-reinforcement*. Ekspresi menghasilkan respons jaringan, respons positif membentuk validasi, dan validasi memperkuat keyakinan serta mendorong ekspresi berikutnya. Ketika siklus berlangsung berulang, lingkungan digital menjadi semakin homogen. Pengguna yang memberikan dukungan lebih sering diikuti dan direspons, sedangkan akun yang dianggap menyerang pilihan politik cenderung dibisukan, berhenti diikuti, atau dihindari.

Konflik digital juga dapat memperkuat posisi. Komentar negatif dari kelompok berbeda tidak selalu mendorong evaluasi ulang, tetapi justru meningkatkan keinginan membela kandidat. Kritik dengan bahasa merendahkan dipersepsikan sebagai serangan terhadap kelompok atau identitas personal sehingga perdebatan bergeser dari evaluasi isu menuju pertahanan kelompok. Emosi kolektif berupa kebanggaan, kemarahan, kekhawatiran terhadap kemenangan lawan, dan simpati kepada kandidat turut beredar dalam jaringan. Konten emosional lebih mudah diingat, didiskusikan, dan dibagikan.

Sebaliknya, partisipan dengan jaringan sosial yang lebih beragam menunjukkan kecenderungan berbeda. Interaksi rutin dengan teman yang memiliki pilihan politik berlainan membuat mereka lebih berhati-hati menilai kelompok lawan. Hubungan interpersonal yang telah terbentuk sebelum kompetisi elektoral membatasi generalisasi negatif dan mencegah perbedaan pilihan berkembang secara langsung menjadi konflik identitas.

Kristalisasi Batas Ideologis dan Lintasan Moderasi

Penguatan posisi yang berlangsung berulang dapat berkembang menjadi kristalisasi batas ideologis. Pada tahap ini, perbedaan politik tidak lagi hanya dipahami sebagai perbedaan pilihan kandidat, tetapi menjadi kategori sosial dan moral mengenai kelompok sendiri dan kelompok lain. Penggunaan istilah “kami” dan “mereka” semakin terlihat, sementara pilihan politik mulai dikaitkan dengan karakter personal kelompok pendukung.

Empat indikator kristalisasi teridentifikasi. Pertama, *identity closure*, berupa meningkatnya keterikatan pada identitas politik dan menurunnya keterbukaan mengevaluasi posisi. Kedua, *out-group generalization*, ketika pengalaman dengan beberapa pengguna digunakan untuk menilai keseluruhan kelompok. Ketiga, *moral distancing*, yaitu kecenderungan memandang kelompok berbeda memiliki nilai atau karakter lebih rendah. Keempat, *interaction avoidance*, berupa

penghindaran diskusi, pembatasan hubungan digital, dan penolakan terhadap sumber yang diasosiasikan dengan kelompok lain.

Pada kasus dengan kristalisasi kuat, bahasa partisipan mengenai kelompok politik berbeda mengalami perubahan. Penilaian terhadap program dan kandidat bercampur dengan stereotip pendukung. Informasi dari kelompok berbeda lebih cepat dicurigai, sedangkan informasi yang mendukung kelompok sendiri lebih mudah diterima. Batas ideologis dengan demikian berkembang menjadi kerangka untuk menilai kredibilitas informasi dan aktor politik.

Meskipun demikian, lintasan menuju polarisasi bukan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Sejumlah kasus menunjukkan *moderation trajectory*, ketika pengalaman digital menghasilkan refleksi dan kehati-hatian terhadap identifikasi politik. Lintasan ini muncul pada partisipan yang membandingkan informasi, memiliki hubungan interpersonal lintas kelompok, dan menyadari bahwa konten yang pernah dibagikan tidak lengkap atau menyesatkan. Pengalaman menemukan ketidaksesuaian informasi menjadi titik reflektif yang mendorong pemeriksaan sumber, pencarian konteks lengkap, dan penghindaran perdebatan yang hanya menghasilkan permusuhan. Paparan perspektif berbeda tidak selalu mengubah pilihan, tetapi mengurangi generalisasi dan jarak moral terhadap kelompok lain.

Sintesis lintas kasus menghasilkan dua lintasan utama. *Polarization reinforcement trajectory* bergerak melalui paparan terpersonalisasi, ekspresi identitas, validasi jaringan, homogenisasi interaksi, dan kristalisasi batas ideologis. Sebaliknya, *reflective moderation trajectory* berkembang melalui paparan beragam, pemeriksaan informasi, interaksi lintas kelompok, refleksi kritis, dan pemisahan pilihan politik dari penilaian moral terhadap kelompok lain. Polarisasi terbentuk ketika tindakan digital, respons jaringan, dan interpretasi identitas saling memperkuat secara berulang, sedangkan moderasi muncul ketika siklus tersebut diinterupsi oleh keragaman paparan, hubungan lintas kelompok, dan refleksi kritis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengidentifikasi pola prosedural *personalized exposure-visible political expression-networked validation-ideological boundary crystallization* sebagai mekanisme dominan penguatan polarisasi. Namun, keberadaan *negative cases* menegaskan sifat kondisional mekanisme tersebut. Interaksi lintas kelompok dan refleksi kritis dapat mengubah arah proses dari penguatan identitas menuju moderasi politik. Temuan ini menjadi dasar empiris bagi konstruksi model mekanisme partisipasi politik digital dan polarisasi ideologis pemilih pemula.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi politik digital pemilih pemula dan polarisasi ideologis tidak berlangsung secara langsung, linear, atau deterministik.

Intensitas penggunaan media sosial bukan penjelas tunggal bagi penajaman perbedaan politik. Polarisasi berkembang melalui rangkaian proses sosial-komunikatif ketika paparan politik yang semakin terpersonalisasi diikuti oleh ekspresi posisi, respons jaringan, penguatan identitas, dan pembentukan batas terhadap kelompok politik lain. Sebaliknya, rangkaian tersebut dapat mengalami interupsi ketika pemilih memperoleh paparan yang lebih beragam, melakukan pemeriksaan informasi, mempertahankan hubungan lintas kelompok, dan mengembangkan refleksi kritis. Temuan ini memperluas kajian mengenai efek media digital yang selama ini menunjukkan hubungan positif antara penggunaan media dan partisipasi politik, tetapi belum selalu menjelaskan konsekuensi ideologis dari praktik partisipasi yang berlangsung secara berulang (Boulianne, 2020; Boulianne & Theocharis, 2020).

Personalisasi Paparan sebagai Pembiasaan Awal Orientasi Politik

Tema personalisasi paparan menunjukkan bahwa pengalaman politik digital pemilih pemula sering tidak dimulai melalui pencarian informasi yang disengaja. Politik memasuki lingkungan digital bersama konten hiburan, pendidikan, dan interaksi sosial sehari-hari. Kondisi ini menguatkan argumentasi Ekström dan Shehata (2018) mengenai semakin porusnya batas antara aktivitas keseharian dan keterlibatan politik kaum muda. Media sosial memungkinkan politik hadir secara insidental sebelum individu mengembangkan motivasi politik yang stabil. Bagi pemilih pemula, paparan tersebut memiliki arti penting karena berlangsung pada periode ketika pengalaman elektoral dan orientasi politik masih berkembang.

Temuan mengenai pergerakan dari *incidental political exposure* menuju *selective political exploration* dan *personalized repetitive exposure* memperlihatkan interaksi antara tindakan pengguna dan struktur platform. Theocharis et al. (2023) menegaskan bahwa *platform affordances* membentuk kemungkinan tindakan politik pengguna, sedangkan Huszár et al. (2022) menunjukkan keberadaan amplifikasi algoritmik terhadap konten politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personalisasi tidak sepenuhnya dapat ditempatkan sebagai proses teknologi yang bekerja secara eksternal terhadap pemilih. Tindakan menonton, mengikuti akun, membuka komentar, dan berinteraksi dengan konten ikut membentuk lingkungan informasi berikutnya. Dengan demikian, personalisasi paparan berkembang sebagai proses relasional antara arsitektur platform dan praktik pengguna.

Perspektif tersebut memperjelas posisi *echo chamber* dalam pengalaman pemilih pemula. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa homofili dan pola difusi informasi dapat membentuk komunitas informasi yang relatif terpisah, meskipun intensitasnya berbeda antarplatform. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa homogenisasi lingkungan informasi tidak selalu terbentuk karena pemilih secara sadar menolak seluruh perspektif berbeda. Pada sejumlah kasus, homogenisasi berkembang secara bertahap melalui interaksi berulang dengan konten yang dianggap menarik, relevan, atau

sesuai dengan orientasi awal. Proses tersebut menghasilkan apa yang dapat disebut *interpretive familiarity*, yaitu kondisi ketika pengulangan narasi, simbol, dan pembingkaiannya tertentu membuat suatu interpretasi politik terasa semakin familiar dan mudah diterima.

Namun, hasil penelitian juga mendukung kritik terhadap asumsi efek digital yang terlalu deterministik. Guess et al. (2023) menunjukkan bahwa amplifikasi berita melalui pembagian ulang tidak secara terdeteksi mengubah keyakinan atau opini politik. Boxell et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa perkembangan polarisasi afektif berbeda lintas negara dan tidak dapat direduksi menjadi akibat tunggal penggunaan internet. Dalam penelitian ini, paparan terpersonalisasi tidak selalu menghasilkan kristalisasi ideologis. Konsekuensi paparan bergantung pada tindakan interpretatif berikutnya. Dengan demikian, paparan sebaiknya dipahami sebagai kondisi pembingkaiannya awal, bukan penyebab langsung polarisasi.

Ekspresi Politik Digital dan Pembentukan Identitas yang Terlihat

Temuan kedua menunjukkan bahwa titik perubahan penting terjadi ketika orientasi politik berpindah dari pengalaman internal menuju ekspresi yang terlihat oleh jaringan. Aktivitas memberikan tanda suka, membagikan konten, menggunakan simbol, dan memproduksi pesan politik membuat preferensi individu memperoleh dimensi sosial. Temuan ini berkaitan dengan konsep *self-reinforcement* dari Cho et al. (2018), yang menjelaskan bahwa ekspresi politik daring dapat memperkuat orientasi politik individu. Hasil penelitian memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa penguatan diri terjadi bersamaan dengan proses *networked identity attribution*, yaitu ketika jaringan sosial mulai mengatribusikan identitas politik kepada individu berdasarkan jejak ekspresinya.

Atribusi tersebut penting bagi pemilih pemula karena ekspresi digital tidak selalu diawali dengan identifikasi ideologis yang mapan. Pada beberapa kasus, partisipan awalnya memandang aktivitas berbagi konten sebagai tindakan ringan atau respons terhadap tren. Akan tetapi, respons pengguna lain membuat tindakan tersebut dibaca sebagai tanda dukungan politik. Ketika individu diminta menjelaskan, mempertahankan, atau mengklarifikasi posisinya, ekspresi digital mulai berfungsi sebagai proses artikulasi identitas. Dengan demikian, identitas politik tidak hanya mendahului ekspresi, tetapi dapat dikonstruksi dan dipertegas melalui konsekuensi sosial dari ekspresi.

Temuan ini relevan dengan perubahan karakter partisipasi politik kaum muda. Zhu et al. (2019) menunjukkan posisi ekspresi politik daring dalam hubungan antara penggunaan media sosial kreatif dan partisipasi politik. Moffett dan Rice (2024) juga memperlihatkan keterkaitan TikTok dengan aktivitas kewargaan kaum muda. Konsep *expressive citizenship* yang dikembangkan Kligler-Vilenchik dan Literat (2025) semakin menegaskan bahwa kewargaan kaum muda berkembang

melalui bentuk ekspresi yang personal, kreatif, dan berjejaring. Temuan penelitian ini menunjukkan sisi ideologis dari praktik tersebut: ketika ekspresi personal memperoleh atribusi kelompok, kreativitas politik dapat menjadi medium pembentukan batas identitas.

Humor, meme, video pendek, dan simbol digital karena itu tidak dapat selalu ditempatkan sebagai bentuk partisipasi politik berintensitas rendah. Format tersebut memiliki kemampuan untuk menyederhanakan perbedaan politik menjadi tanda identifikasi yang mudah direproduksi. Brady et al. (2017) menunjukkan bahwa konten moral-emosional memiliki daya difusi yang tinggi dalam jaringan sosial. Dalam temuan penelitian ini, simbol dan humor politik sering berfungsi sebagai *identity shorthand*, yaitu penanda ringkas yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi kedekatan atau jarak politik tanpa menyampaikan argumentasi kebijakan secara panjang. Pengulangan penanda tersebut memperjelas posisi kelompok dan menyediakan bahasa bersama bagi komunitas digital.

Temuan ini sekaligus memperluas kajian partisipasi politik pemilih pertama. Ohme (2019) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial politik dapat memobilisasi partisipasi kampanye pemilih pertama. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konsekuensi partisipasi tidak berhenti pada peningkatan keterlibatan. Ketika partisipasi berlangsung melalui ekspresi yang terlihat, tindakan tersebut dapat menghasilkan komitmen identitas. Oleh sebab itu, analisis terhadap partisipasi digital perlu mempertimbangkan bukan hanya apakah pemilih berpartisipasi, tetapi bagaimana tindakan partisipatif menjadi bagian dari proses pembentukan diri politik.

Validasi Berjejaringan sebagai Mekanisme Penguatan Ideologis

Tema validasi berjejaringan menjelaskan mekanisme yang menghubungkan ekspresi politik dengan penguatan posisi. Temuan menunjukkan bahwa tanda suka, komentar mendukung, pembagian ulang, dan keberadaan pengguna lain dengan pandangan serupa dipahami sebagai informasi sosial mengenai penerimaan terhadap orientasi politik. Dukungan jaringan tidak hanya meningkatkan visibilitas ekspresi, tetapi juga memberikan rasa legitimasi terhadap posisi individu. Pada tahap ini, proses *expression-validation-reinforcement* membentuk siklus yang dapat meningkatkan konsistensi dan intensitas ekspresi politik.

Temuan tersebut memberikan dimensi prosedural terhadap kajian polarisasi digital. Kubin dan von Sikorski (2021) menunjukkan bahwa hubungan media sosial dan polarisasi dipengaruhi oleh paparan selektif, identitas, serta interaksi antarkelompok. Hasil penelitian ini menempatkan validasi jaringan sebagai mekanisme mikro yang menjelaskan bagaimana orientasi politik memperoleh kekuatan sosial. Pemilih tidak hanya menemukan informasi yang sejalan, tetapi mengalami bahwa posisi mereka diakui oleh orang lain. Pengakuan tersebut membentuk *networked ideological reassurance*,

yaitu pengalaman ketika respons jaringan mengurangi keraguan dan meningkatkan keyakinan terhadap posisi politik.

Siklus penguatan semakin intensif ketika konten politik memobilisasi emosi kelompok. Rathje et al. (2021) menunjukkan bahwa animositas terhadap kelompok luar merupakan prediktor kuat keterlibatan media sosial. Osmundsen et al. (2021) menemukan bahwa motivasi partisan memiliki posisi utama dalam perilaku berbagi berita politik palsu. Weismueller et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kepalsuan dan keberpihakan berperan dalam hubungan antara berbagi informasi dan polarisasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemilih pemula tidak selalu membagikan konten setelah mengevaluasi seluruh klaim faktualnya. Dalam sejumlah kasus, kesesuaian konten dengan identitas kelompok dan emosi yang dirasakan menjadi dasar distribusi yang lebih kuat.

Konflik dengan kelompok berbeda juga ditemukan dapat memperkuat identifikasi. Temuan tersebut konsisten dengan Bail et al. (2018), yang menunjukkan bahwa paparan terhadap pandangan berlawanan dalam kondisi tertentu justru meningkatkan polarisasi. Penelitian ini memperjelas bahwa bentuk interaksi menjadi aspek penting. Paparan yang hadir melalui ejekan, serangan, atau delegitimasi identitas cenderung ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kelompok. Respons yang muncul bukan evaluasi terhadap argumentasi, tetapi pertahanan identitas. Dengan demikian, keberagaman paparan tidak otomatis menghasilkan deliberasi apabila struktur interaksi mengaktifkan pertahanan kelompok.

Dalam konteks demokrasi digital Indonesia, mekanisme ini memiliki relevansi khusus. Saud dan Margono (2021) menunjukkan perkembangan ruang partisipasi politik kaum muda dalam demokrasi digital Indonesia, sedangkan Tarsidi et al. (2023) menempatkan penggunaan media sosial sebagai bagian dari keterlibatan kewargaan digital native. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan partisipasi dapat memiliki konsekuensi berbeda ketika berlangsung dalam jaringan yang memberikan validasi partisan secara berulang. Aktivasi kewargaan dan penguatan identitas ideologis dapat berlangsung secara bersamaan.

Kristalisasi Batas Ideologis dan Kondisionalitas Polarisasi

Kristalisasi batas ideologis merupakan tahap ketika penguatan posisi berkembang dari preferensi politik menuju kategorisasi sosial mengenai kelompok sendiri dan kelompok lain. Empat indikator yang ditemukan *identity closure*, *out-group generalization*, *moral distancing*, dan *interaction avoidance* menunjukkan bahwa polarisasi tidak hanya berkaitan dengan jarak pandangan mengenai kandidat. Polarisasi memperoleh kedalaman ketika pilihan politik menjadi dasar untuk menilai karakter dan moralitas kelompok.

Temuan ini memiliki hubungan dengan konsepsi polarisasi afektif yang menekankan jarak emosional antarkelompok. Boxell et al. (2024) menunjukkan bahwa polarisasi afektif merupakan fenomena yang memiliki variasi kontekstual. Hasil penelitian ini memperlihatkan mekanisme mikro yang dapat mendukung pembentukan jarak tersebut pada pemilih pemula. Pengalaman berulang menerima validasi dari kelompok sendiri dan mengalami konflik dengan kelompok lain menghasilkan generalisasi. Pengalaman terhadap sejumlah pengguna kemudian digunakan untuk membentuk gambaran mengenai keseluruhan kelompok politik.

Pada tingkat diskursus, temuan ini relevan dengan Demszky et al. (2019), yang menunjukkan bahwa polarisasi dapat terlihat melalui perbedaan pembedaan suatu persoalan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketika batas ideologis mengkristal, informasi yang sama dapat memperoleh kredibilitas berbeda berdasarkan identitas sumber. Informasi dari kelompok sendiri lebih mudah memperoleh penerimaan, sedangkan sumber yang diasosiasikan dengan kelompok lawan menghadapi kecurigaan awal. Dalam konteks disinformasi, kondisi tersebut menjadi penting. Subekti et al. (2025) menunjukkan keberadaan disinformasi terhadap kandidat dalam Pemilu Presiden Indonesia 2024, sementara Setiawati et al. (2023) memperlihatkan persepsi kritis mahasiswa terhadap media sosial sebagai sumber berita politik dalam masyarakat terpolarisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kristalisasi identitas dapat memengaruhi cara pemilih menilai kredibilitas informasi partisan.

Meskipun demikian, salah satu temuan penting penelitian adalah keberadaan *reflective moderation trajectory*. Temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik digital tidak secara inheren menghasilkan polarisasi. Pemilih yang membandingkan sumber, memiliki hubungan interpersonal lintas pilihan politik, dan mengalami koreksi terhadap informasi yang sebelumnya dipercayai menunjukkan kecenderungan lebih reflektif. Paparan terhadap perbedaan tetap dapat menghasilkan ketidaksetujuan, tetapi tidak selalu berkembang menjadi penilaian moral negatif terhadap kelompok lain.

Temuan tersebut memperkuat perlunya membedakan perbedaan politik dari polarisasi ideologis. Aktivitas media sosial dapat mendukung partisipasi publik dan orientasi demokratis sebagaimana ditunjukkan Sukidin et al. (2025). Boulianne dan Theocharis (2020) juga menegaskan potensi media digital dalam keterlibatan kaum muda. Oleh karena itu, persoalan utama bukan keberadaan ekspresi atau perbedaan politik, tetapi kondisi ketika ekspresi, validasi, dan konflik membentuk siklus penguatan tertutup. Hubungan lintas kelompok dan refleksi kritis bekerja sebagai *cycle-interrupting mechanisms* yang dapat menghentikan pergerakan dari identifikasi menuju moral distancing.

Digital Participation-Ideological Polarization Mechanism among First-Time Voters

Sintesis temuan dan dialog teoretis menghasilkan model *Digital Participation-Ideological Polarization Mechanism among First-Time Voters*. Model ini menjelaskan polarisasi ideologis sebagai konsekuensi kondisional dari rangkaian praktik partisipasi politik digital, bukan sebagai efek otomatis penggunaan media sosial. Mekanisme inti model terdiri atas empat proses yang saling terhubung, yaitu *personalized political exposure*, *visible political expression*, *networked ideological reinforcement*, dan *ideological boundary crystallization*.

Personalized political exposure membentuk lingkungan interpretatif melalui interaksi antara paparan insidental, eksplorasi selektif, tindakan pengguna, dan personalisasi platform. Paparan tersebut menyediakan narasi dan simbol yang digunakan pemilih untuk membingkai aktor serta isu politik. *Visible political expression* mengubah orientasi personal menjadi tindakan yang dapat dibaca oleh jaringan. Pada tahap ini, ekspresi menghasilkan *networked identity attribution* dan mendorong pemilih mengartikulasikan serta mempertahankan posisi politik.

Selanjutnya, *networked ideological reinforcement* berlangsung melalui respons, dukungan, konflik, dan emosi kolektif. Validasi dari kelompok sejalan menghasilkan *networked ideological reassurance*, sedangkan interaksi konfliktual dengan kelompok berbeda dapat mengaktifkan pertahanan identitas. Apabila siklus *expression-validation-reinforcement* berlangsung secara berulang dan disertai homogenisasi interaksi, proses bergerak menuju *ideological boundary crystallization*. Tahap tersebut ditandai oleh penutupan identitas, generalisasi kelompok luar, jarak moral, dan penghindaran interaksi.

Kebaruan utama model terletak pada proposisi bahwa partisipasi politik digital menjadi mekanisme polarisasi ketika ekspresi politik yang terlihat memperoleh validasi berjejaringan secara berulang dan mengubah preferensi elektoral menjadi batas identitas sosial dan moral. Dengan demikian, *networked ideological reinforcement* diposisikan sebagai mekanisme proksimal yang menjembatani partisipasi digital dengan kristalisasi batas ideologis. Perspektif ini mengisi kesenjangan antara kajian partisipasi digital yang berorientasi pada mobilisasi dan kajian polarisasi yang lebih dominan menekankan paparan, algoritma, atau struktur jaringan.

Model juga mengidentifikasi jalur alternatif berupa *reflective moderation trajectory*. Jalur ini terbentuk ketika siklus penguatan diinterupsi oleh keberagaman paparan, pemeriksaan informasi, ikatan interpersonal lintas kelompok, dan refleksi kritis. Mekanisme tersebut tidak selalu mengubah pilihan elektoral, tetapi dapat mencegah perbedaan politik berkembang menjadi generalisasi dan jarak moral. Oleh karena itu, model mengusulkan dua lintasan konseptual: *personalized exposure-visible expression-networked reinforcement-ideological boundary crystallization* sebagai *polarization reinforcement trajectory* dan *diverse exposure-information verification-cross-group interaction-critical reflection-political moderation* sebagai *reflective moderation trajectory*.

Model *Digital Participation-Ideological Polarization Mechanism among First-Time Voters* dengan demikian memperluas pemahaman tentang posisi pemilih pemula dalam demokrasi digital. Pemilih pemula bukan sekadar penerima paparan algoritmik maupun objek mobilisasi kampanye, tetapi aktor yang melalui tindakan ekspresi, distribusi, seleksi interaksi, dan respons terhadap jaringan ikut membentuk lingkungan ideologisnya sendiri. Polarisasi muncul dari hubungan rekursif antara struktur platform, praktik partisipatif, validasi sosial, dan interpretasi identitas. Temuan ini menegaskan bahwa analisis demokrasi digital perlu bergeser dari pertanyaan mengenai seberapa sering kaum muda menggunakan media sosial menuju pemahaman mengenai bagaimana praktik partisipasi digital secara bertahap membentuk, memperkuat, atau justru memoderasi batas ideologis dalam pengalaman elektoral pertama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik digital pemilih pemula memiliki hubungan yang kompleks dan kondisional dengan pembentukan polarisasi ideologis dalam pemilihan umum. Polarisasi tidak terbentuk secara otomatis akibat tingginya intensitas penggunaan media sosial maupun sekadar karena pemilih terpapar konten politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penajaman batas ideologis berkembang melalui rangkaian proses sosial dan komunikatif ketika paparan politik yang semakin terpersonalisasi diikuti oleh ekspresi politik yang terlihat, memperoleh validasi berjangkauan secara berulang, dan selanjutnya mengubah preferensi elektoral menjadi bagian dari identitas sosial serta penilaian moral terhadap kelompok politik lain. Dengan demikian, persoalan utama partisipasi politik digital tidak terletak pada keberadaan aktivitas politik di media sosial, tetapi pada mekanisme penguatan yang terbentuk melalui interaksi antara praktik pengguna, struktur jaringan, dan pemaknaan identitas politik.

Temuan paling penting penelitian terletak pada posisi penguatan ideologis berjangkauan sebagai mekanisme proksimal yang menghubungkan partisipasi politik digital dengan kristalisasi batas ideologis. Ekspresi politik berupa pemberian respons, pembagian konten, penggunaan simbol, produksi pesan, dan keterlibatan dalam diskusi membuat orientasi politik pemilih pemula menjadi terlihat oleh jaringan sosial. Respons berupa dukungan, pengakuan, konflik, atau penolakan kemudian membentuk pengalaman sosial yang dapat memperkuat konsistensi posisi politik. Ketika siklus ekspresi–validasi–penguatan berlangsung secara berulang dalam lingkungan interaksi yang semakin homogen, pemilih cenderung mengembangkan penutupan identitas, generalisasi terhadap kelompok luar, jarak moral, dan penghindaran interaksi. Pada tahap tersebut, perbedaan pilihan politik telah bergerak melampaui kompetisi elektoral dan berkembang menjadi batas ideologis antarkelompok.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini diwujudkan melalui konstruksi model *Digital Participation-Ideological Polarization Mechanism among First-Time Voters*. Model tersebut mengintegrasikan dimensi paparan politik digital, ekspresi politik yang terlihat, penguatan ideologis berjejaringan, dan kristalisasi batas ideologis dalam satu mekanisme prosedural. Kebaruan model terletak pada argumentasi bahwa partisipasi digital menjadi mekanisme polarisasi ketika ekspresi politik memperoleh validasi sosial secara berulang dan membentuk keterikatan identitas yang semakin tertutup. Perspektif ini memperluas kajian partisipasi politik digital yang dominan menekankan mobilisasi dan keterlibatan, sekaligus melengkapi kajian polarisasi yang lebih banyak berfokus pada algoritma, paparan informasi, dan struktur jaringan. Pemilih pemula ditempatkan sebagai aktor aktif yang turut membentuk lingkungan ideologis melalui tindakan memilih, mengekspresikan, mendistribusikan, dan merespons informasi politik.

Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi digital tidak selalu menghasilkan polarisasi. Lintasan moderasi reflektif muncul ketika siklus penguatan ideologis diinterupsi oleh keberagaman paparan, pemeriksaan informasi, interaksi interpersonal lintas kelompok, dan refleksi kritis. Kondisi tersebut tidak selalu mengubah pilihan politik pemilih pemula, tetapi dapat mencegah perbedaan elektoral berkembang menjadi generalisasi dan jarak moral. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi politik digital yang tidak terbatas pada kemampuan mengenali informasi palsu, tetapi mencakup kemampuan memahami personalisasi informasi, mengevaluasi respons emosional, membangun interaksi lintas perspektif, dan merefleksikan hubungan antara ekspresi digital dengan pembentukan identitas politik.

Keterbatasan penelitian terletak pada karakter desain studi kasus multipel yang menghasilkan pemahaman kontekstual sehingga transferabilitas temuan perlu mempertimbangkan perbedaan karakter pemilih, platform digital, lingkungan sosial, dan dinamika kompetisi elektoral. Penelitian juga berfokus pada pengalaman pemilih pemula dan belum mengukur perubahan jarak ideologis secara longitudinal. Penelitian selanjutnya perlu menguji model yang dihasilkan melalui desain metode campuran, etnografi digital longitudinal, atau analisis jaringan pada populasi pemilih yang lebih luas. Pengembangan ukuran penguatan ideologis berjejaringan juga diperlukan untuk menguji secara empiris posisinya sebagai mekanisme yang menjembatani partisipasi politik digital dan polarisasi ideologis. Dengan demikian, kajian mendatang dapat memperjelas kondisi ketika ruang digital memperkuat fragmentasi politik atau justru mendukung keterlibatan demokratis yang lebih reflektif.

KONFLIK KEPENTINGAN

"Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian maupun publikasi artikel ini."

DAFTAR PUSTAKA

- Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B. F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>
- Boulianne, S. (2020). Twenty Years of Digital Media Effects on Civic and Political Participation. *Communication Research*, 47(7), 947–966. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>
- Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Young People, Digital Media, and Engagement: A Meta-Analysis of Research. *Social Science Computer Review*, 38(2), 111–127. <https://doi.org/10.1177/0894439318814190>
- Boxell, L., Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. (2024). Cross-Country Trends in Affective Polarization. *The Review of Economics and Statistics*, 106(2), 557–565. https://doi.org/10.1162/rest_a_01160
- Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>
- Cho, J., Ahmed, S., Keum, H., Choi, Y. J., & Lee, J. H. (2018). Influencing Myself: Self-Reinforcement Through Online Political Expression. *Communication Research*, 45(1), 83–111. <https://doi.org/10.1177/0093650216644020>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Demszky, D., Garg, N., Voigt, R., Zou, J., Shapiro, J., Gentzkow, M., & Jurafsky, D. (2019). Analyzing Polarization in Social Media: Method and Application to Tweets on 21 Mass Shootings. Dalam J. Burstein, C. Doran, & T. Solorio (Ed.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)* (hlm. 2970–3005). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1304>
- Ekström, M., & Shehata, A. (2018). Social media, porous boundaries, and the development of online political engagement among young citizens. *New Media & Society*, 20(2), 740–759. <https://doi.org/10.1177/1461444816670325>



- Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., Dimmery, D., Freelon, D., Gentzkow, M., González-Bailón, S., Kennedy, E., Kim, Y. M., Lazer, D., Mochler, D., Nyhan, B., Rivera, C. V., Settle, J., Thomas, D. R., ... Tucker, J. A. (2023). Reshares on social media amplify political news but do not detectably affect beliefs or opinions. *Science*, 381(6656), 404–408. <https://doi.org/10.1126/science.add8424>
- Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), e2025334119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119>
- Kligler-Vilenchik, N., & Literat, I. (2025). Expressive citizenship: Youth, social media, and democracy. *Journal of Children and Media*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.1080/17482798.2024.2438680>
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The Role of (Social) Media in Political Polarization: A Systematic Review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Moffett, K. W., & Rice, L. L. (2024). TikTok and Civic Activity Among Young Adults. *Social Science Computer Review*, 42(2), 535–553. <https://doi.org/10.1177/08944393231188470>
- Ohme, J. (2019). When digital natives enter the electorate: Political social media use among first-time voters and its effects on campaign participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1613279>
- Osmundsen, M., Bor, A., Vahlstrup, P. B., Bechmann, A., & Petersen, M. B. (2021). Partisan Polarization Is the Primary Psychological Motivation behind Political Fake News Sharing on Twitter. *American Political Science Review*, 115(3), 999–1015. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000290>
- Rathje, S., Van Bavel, J. J., & van der Linden, S. (2021). Out-group animosity drives engagement on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(26), e2024292118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Setiawati, T., Tiara, A., & Mustika, S. (2023). Social Media as a Negative Source of Political News in a Polarized Society? Indonesian and Filipino Students' Perception. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 243–256. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art7>

- Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: The evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>
- Sukidin, Hudha, C., & Basrowi. (2025). Shaping democracy in Indonesia: The influence of multicultural attitudes and social media activity on participation in public discourse and attitudes toward democracy. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101440. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101440>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An Analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 257–269.
- Theocharis, Y., Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2023). Platform affordances and political participation: How social media reshape political engagement. *West European Politics*, 46(4), 788–811. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410>
- Weismueller, J., Gruner, R. L., Harrigan, P., Coussement, K., & Wang, S. (2024). Information sharing and political polarisation on social media: The role of falsehood and partisanship. *Information Systems Journal*, 34(3), 854–893. <https://doi.org/10.1111/isj.12453>
- Zhu, A. Y. F., Chan, A. L. S., & Chou, K. L. (2019). Creative social media use and political participation in young people: The moderation and mediation role of online political expression. *Journal of Adolescence*, 77, 108–117. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.10.010>

